

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

ANGKATAN 6 TAHUN 2022

Perencanaan Kegiatan PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN PUBLIK

WIDYAISWARA
AHLI MADYA
B P S D M
PROVINSI DKI JAKARTA



mahendrawirawan@gmail.com



085100208556



<https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=roM-I24AAAAJ>



SINTA ID : 6727304



<https://www.wirakarta.com>

Dr. Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, MM, MT, IPU





PERKENALAN PESERTA

- Nama
- Latar belakang pendidikan
- Tempat tugas

DESKRIPSI

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan merencanakan kegiatan pelayanan publik melalui penyusunan dan pengorganisasian tahapan kegiatan pelayanan publik berdasarkan hasil identifikasi unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

HASIL BELAJAR

Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini peserta diharapkan mampu merencanakan kegiatan pelayanan publik, mengidentifikasi unsur unsur yang terlibat, dan penetapan tim pelaksanaan kegiatan.

INDIKATOR HASIL BELAJAR

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:

- a. menjelaskan kegiatan pelayanan publik organisasi;
- b. menjelaskan pengelolaan sumber daya dan penyusunan tim pelaksana kegiatan;
- c. Menjelaskan pemetaan, peran, dan strategi komunikasi terhadap stakeholders mengidentifikasi faktor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen/kontrak; dan
- d. menyusun Surat Keputusan Tim Kegiatan

DASAR HUKUM

01

**Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik**

02

**Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah**

03

**Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**

04

**Peraturan Presiden Republik Indonesia No.76 Tahun
2013
tentang Pengelolaan Pengaduan**

05

**Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.13
Tahun 2009 tentang Metode Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat**

06

**Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No.15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan**

07

**Pergub DKI Jakarta No. 47 tahun 2017
tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

08

**Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta No.16 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Pelayanan
Kesehatan Pegawai**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

BPMI 102021

SE MENPAN dan RB No.20/2021

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia serta untuk melaksanakan nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara. Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core values* “**ASN BerAKHLAK**” dan *employer branding* ASN “**Bangga Melayani Bangsa**”.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



- **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

SEKTOR PRIVAT VS SEKTOR PUBLIK

Dilakukan oleh organisasi yang bertujuan untuk memasarkan produknya.	Dilakukan oleh organisasi pemerintah untuk menyediakan layanan untuk masyarakat.
Dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan implementasi bertanggung jawab kepada pemegang saham.	Dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan implementasi bertanggung jawab kepada berbagai pihak Politisi, Masyarakat, Swasta, LSM, NGO.
Berorientasi kepada keuntungan/profit bagi perusahaan.	Berorientasi kepada manfaat/benefit bagi masyarakat.
Sumber dana dari modal sendiri dengan pertanggung jawaban tertutup.	Sumber dana dari APBN/APBD dengan pertanggung jawaban terbuka.
Penjualan produk dilakukan dengan mekanisme harga.	Penggunaan layanan dilakukan dengan mekanisme tarif.

BARANG PRIVAT DAN BARANG PUBLIK

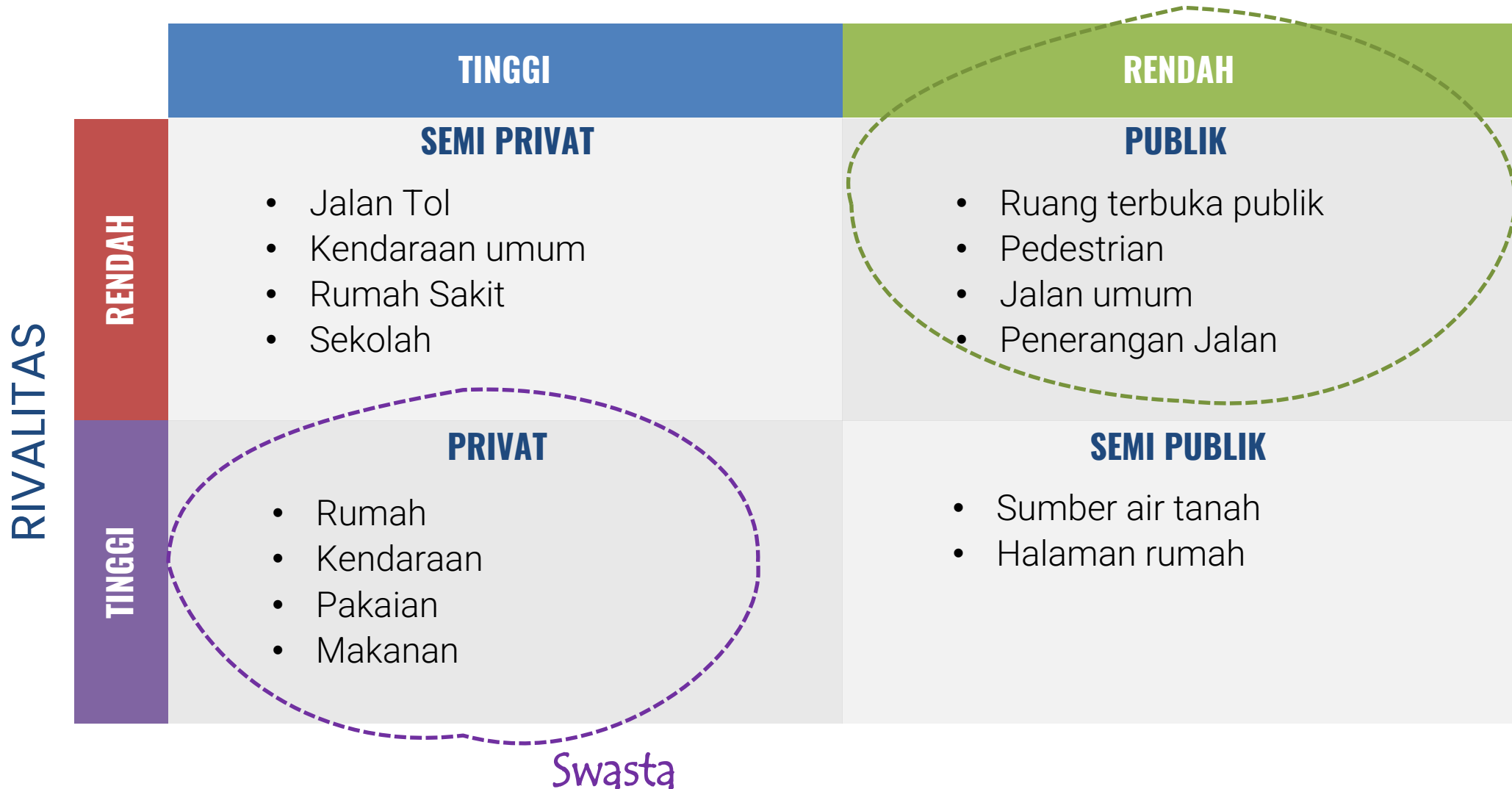
BARANG PRIVAT → Barang yang dihasilkan dengan alokasi sumberdaya private dan tidak dapat diperoleh tanpa pengorbanan

BARANG PUBLIK → Barang yang dihasilkan tanpa alokasi sumber daya dan dapat diperoleh tanpa pengorbanan

PEMANFAATAN DAN KEPEMILIKAN BARANG

EKSKLUDABILITAS

Pemerintah



PENGERTIAN PELAYAN PUBLIK

Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik.....?

UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik

KEBUTUHAN MASYARAKAT

1

PRIMER

Makan, pakaian, tempat tinggal...

2

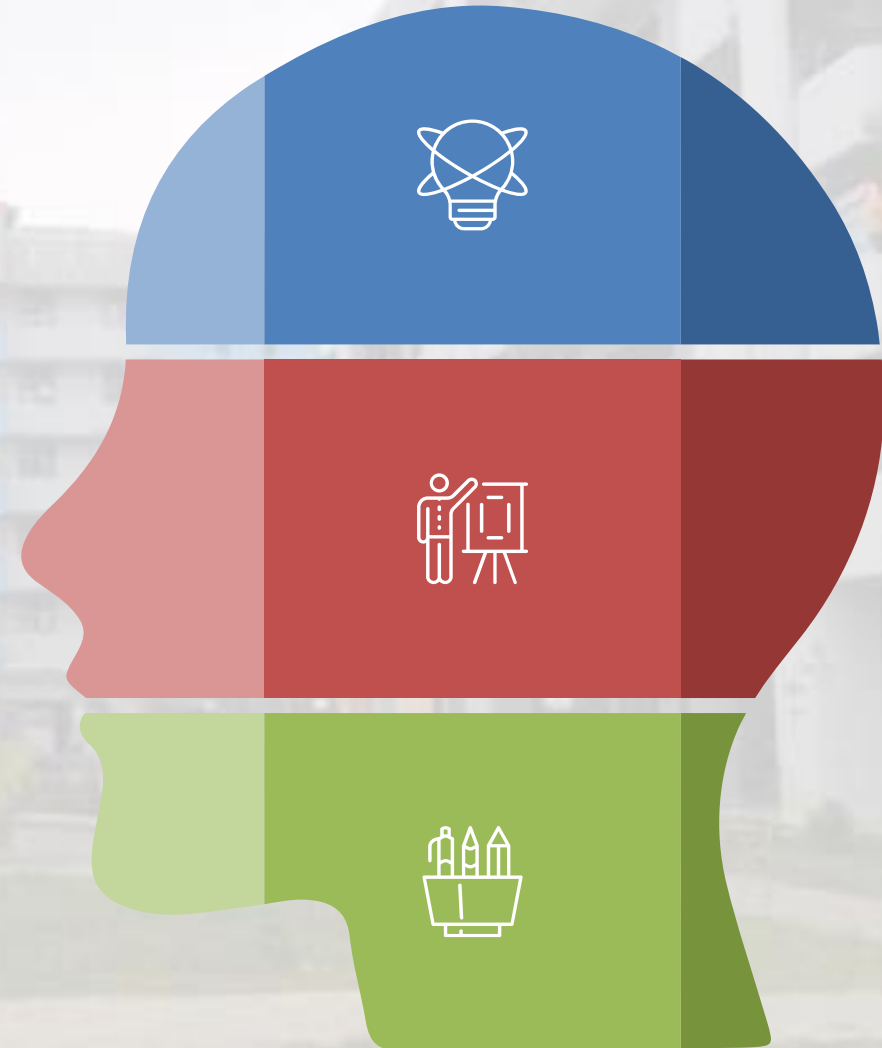
SEKUNDER

Transportasi, komunikasi, olah raga...

3

TERSIER

Wisata, hiburan, kendaraan...



JENIS PELAYANAN PUBLIK

- **Pelayanan Barang**
 - Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, seperti jalan, ruang terbuka, gedung olah raga, saluran dll
- **Pelayanan Administratif**
 - Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, seperti akte, peizinan dll
- **Pelayanan Jasa**
 - Pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dll
- **Pelayanan Regulatif**
 - Pelayanan yang menghasilkan produk peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, seperti penertiban kaki lima, perda larangan merokok dll

Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

UU 25/2009 ntang Pelayanan Publik

-
- Kepentingan umum;
 - Kepastian hukum;
 - Kesamaan hak;
 - Keseimbangan hak dan kewajiban;
 - Keprofesionalan;
 - Partisipatif;
 - Persamaan perlakuan;
 - Keterbukaan;
 - Akuntabilitas;
 - Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 - Ketepatan waktu, dan
 - Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan

PERINSIP PELAYANAN PUBLIK

SEDERHANA

Mudah, cepat dan tidak berbelit – belit,

ADIL & MERATA

Cakupan pelayanan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan perlakuan yang adil

AMAN

Dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum

EFISIEN

Persyaratan dibatasi pada hal yang berkaitan langsung dengan keperluan pelayanan

JELAS DAN TERBUKA

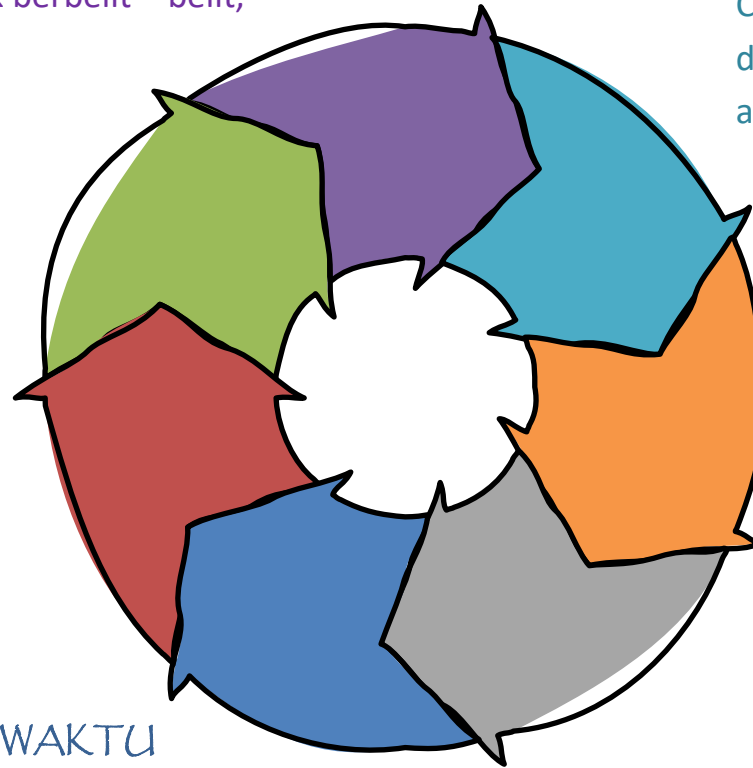
Informasi tentang prosedur, persyaratan, penanggung jawab, pembayaran, waktu penyelesaian, hak dan kewajiban

EKONOMIS

Biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan biaya operasional dan kemampuan masyarakat membayar

TEPAT WAKTU

Pelayanan dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan



FUNGSI DKI JAKARTA

DAERAH OTONOM

(UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah)

1. Urusan Wajib (24)

➤ Pelayanan Dasar (6)

- Pendidikan
- Kesehatan
- PU dan TR
- Perkim
- Trantib, Linmas
- Sosial

➤ Non Pelayanan Dasar (18)

- Naker
- Pemberdayaan PA
- Pangan
- Pertanahan
- LH
- Admindukcapil
- Pemberdayaan masy desa
- Dalduk & KB
- Perhubungan
- Kominfo
- KUKM
- Penanaman Modal
- Kepemudaan & OR
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Arsip

2. Urusan Pilihan (8)

- Kelautan & perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan
- ESDM
- Perdagangan
- Perindustrian
- Pariwisata

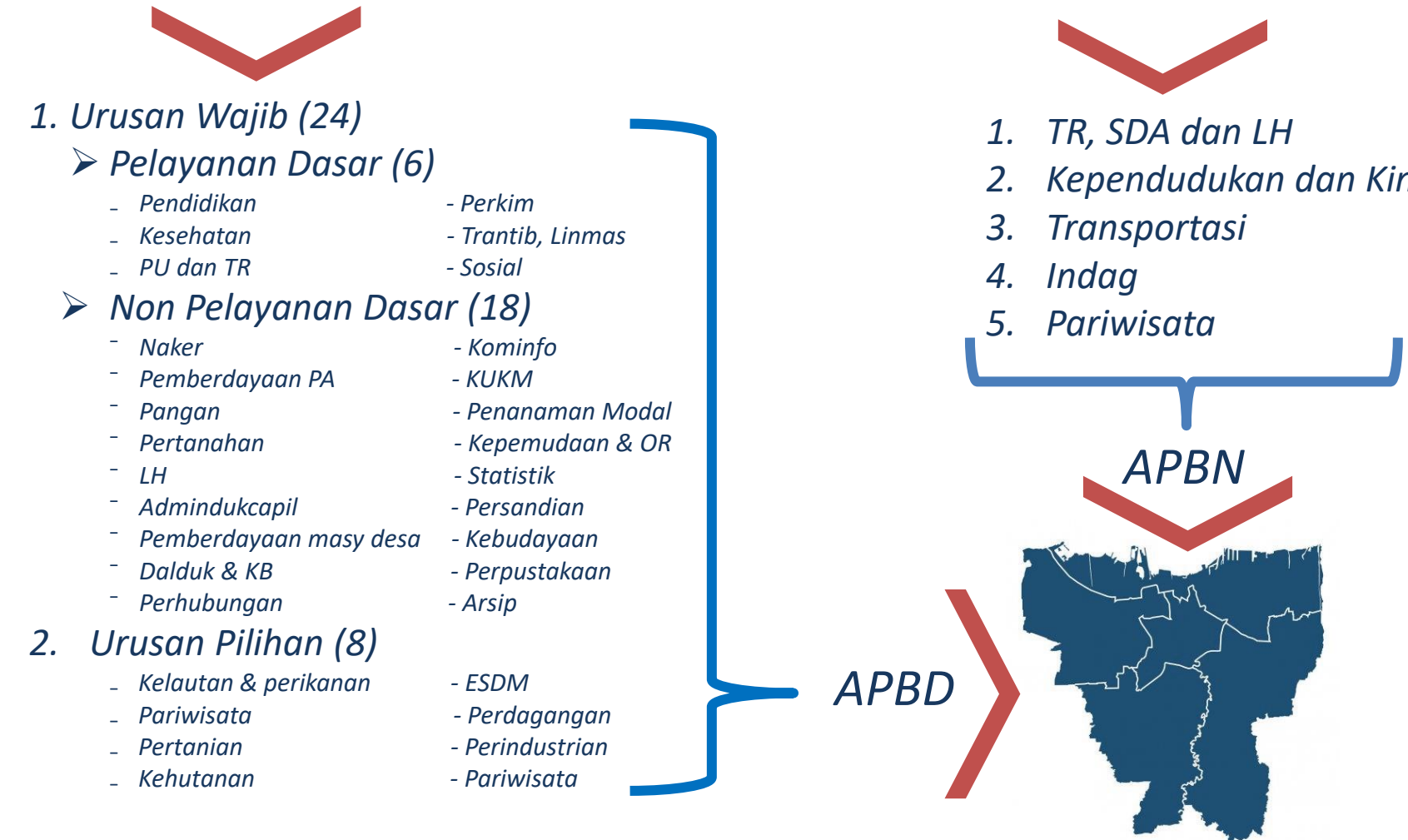
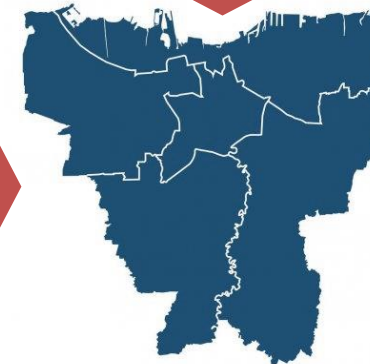
IBU KOTA NKRI

(UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI)

1. TR, SDA dan LH
2. Kependudukan dan Kim
3. Transportasi
4. Indag
5. Pariwisata

APBN

APBD



Identifikasi Permasalahan Pelayanan Publik









INOVASI



LATAR BELAKANG

▶ Paradigma tentang pelayanan Pemerintah:

Lambat

Mahal

Buruk

Tidak Transparan



Rumit

Sulit

Tidak Efektif dan Efisien

Tidak Merata

TUJUAN

Menjawab tantangan evolusi kota melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemda.



SASARAN

CITY 1.0
Pemerintah Kota sebagai administrator warga sebagai penghuni

CITY 2.0
Pemerintah Kota sebagai Penyedia Jasa warga sebagai konsumen

CITY 3.0
Pemerintah Kota sebagai Fasilitator warga sebagai partisipan

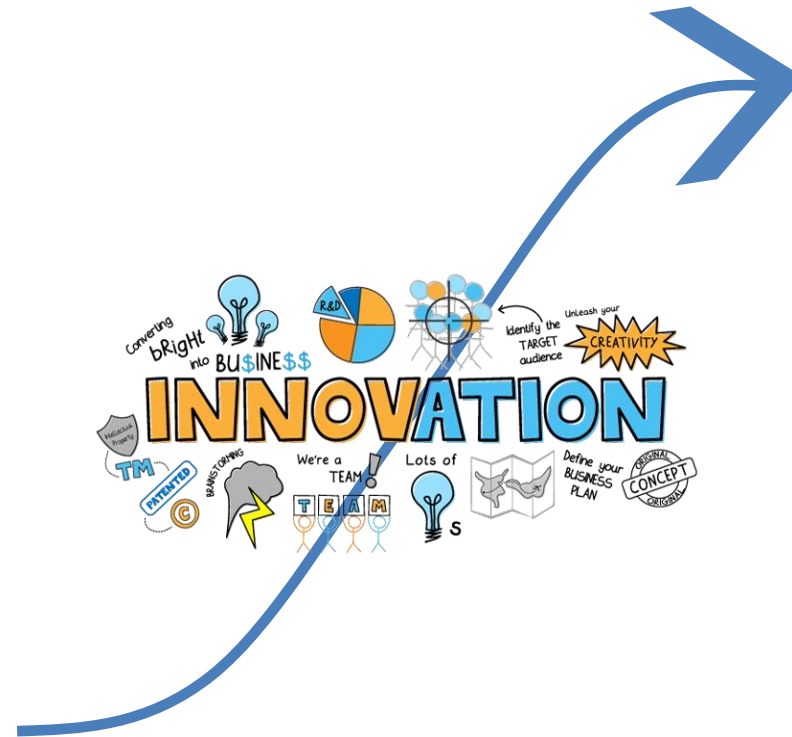
CITY 4.0
Pemerintah Kota sebagai Kolaborator warga sebagai kokreator

Mmpercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- Peningkatan Pelayanan Publik yang cepat, sederhana, murah, mudah, baik, dan merata.
- Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat yang partisipatif dan transparan
- Peningkatan daya saing daerah yang efektif dan efisien

KERANGKA PIKIR

Pelayanan Publik
Yang cepat, mudah,
murah, baik,
efektif/efisien,
transparan dan
merata



Pelayanan Publik
Yang lambat, rumit,
mahal, sulit, buruk,
tidak efektif/efisien,
tidak transparan dan
tidak merata



INOVASI Pelayanan Publik
JAKARTA





**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

**PAJAK ONLINE JAKARTA
PAJAK JAKARTA**

- 01 e-Pajak**
Aplikasi pajak secara *realtime* di portal BPRD.Jakarta.go.id dan info di Pajakonline.jakarta.go.id
- 02 e-Samsat**
Pajak kendaraan online mengecek tarif dasar Pajak Anda dan juga membayar pajak di ATM Bank DKI
- 03 e-POS**
Alat Pajak secara *realtime* untuk kalangan pengusaha rendah
- 04 PBB Online**
Pemetaan Pajak Daerah Online (Geotagging)
- 05 Online Payment**
Bank Pembayaran saat ini sudah 14 bank terintegrasi

Mewujudkan
Smart City Jakarta



Layanan

**e-SAMSAT
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Pengesahan
STNK Tahunan
Gak Pake Antri
melalui
ATM**




Syarat Pembayaran

Layanan e-SAMSAT melalui ATM Bank dipastikan Identitas di Rekening Tabungan **harus sama** dengan KTP, STNK, BPKB Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor

Batas waktu penukaran struk pembayaran yaitu 30 hari dan apabila tidak dilakukan pengesahaan STNK di Kantor Samsat terdekat. Maka, kendaraan dinyatakan tidak sah secara operasional.






PTSP
PENDAFTARAN ONLINE
SKDP
SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

SATUAN PELAKSANA PTSP KELURAHAN RAMBUTAN
JL. Gudang Air No. 36 RT 005 RW 02
Tlp./Fax. (021) 87790004
Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas
Jakarta Timur - 13830

ptspelayananjakarta.go.id
blogspot.co.id

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) adalah surat yang menyatakan domisili suatu badan usaha atau Perusahaan (PT/CV/PTSD/Perorangan, Yayasan, dan keterangan domisili dan mengurus berbagai dokumen seperti SIUP, Tanda D untuk mengurus lainnya.

ALUR PELAYANAN



Buka website
<http://pelayanan.jakarta.go.id>



Username dan Password dikirim ke email Perusahaan



Pengisian Permohonan SKDP Online melalui web <http://pelayanan.jakarta.go.id/> dan pilih tanggal pengembalian SKDP di Kiosur PTSP Setempat

**Mengenal Lebih Jauh:
Mal Pelayanan Publik**

Berlokasi di
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C - 22, Karet
Kuningan, Jakarta Selatan

Merupakan salah satu upaya untuk mengintegrasikan layanan yang diberikan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dalam satu tempat

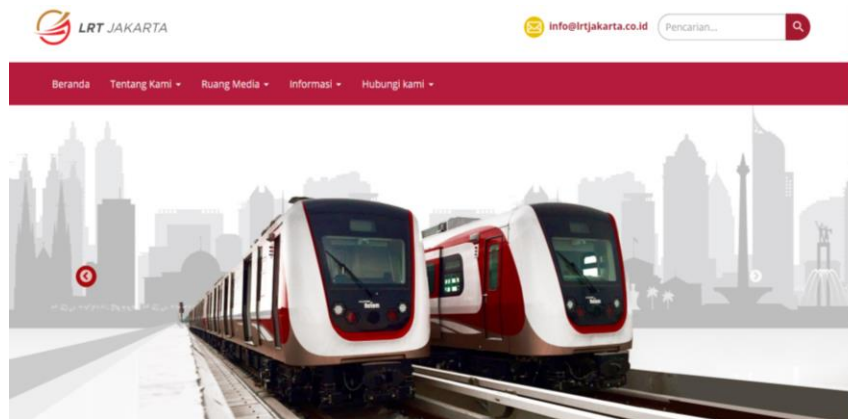
Hasil kolaborasi dari Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bersama unit-unit pelayanan publik lainnya di Jakarta baik Pusat, Daerah, BUMN, BUMD dan swasta lainnya

Memiliki **28 layanan publik** dapat dilayani di Mal Pelayanan Publik

Memiliki **12 lantai**

Fasilitas yang tedapat di Mal Pelayanan Publik:

- Area Tunggu
- ATM
- Counter Pelayanan
- Layanan Difabel
- Layanan Ekspres
- Lobby dan Reception



Jak Lingko

JakLingko adalah program Pemprov DKI Jakarta yang dikelola PT Transjakarta, dengan menerapkan biaya maksimal Rp.5000,- dalam durasi 3 jam mulai tap in pertama sampai tap out terakhir.



Jak Lingko memiliki filosofi 'JARINGAN TERINTEGRASI AMAN DAN NYAMAN'

Lingko merupakan kosakata baru dalam bahasa Indonesia, yang sudah disepakati oleh Badan Bahasa dan dipublikasi akhir Oktober di dalam KBBI.

Kata Lingko diambil dari jenis pengelolaan pengairan sawah di NTT, yang bersistem seperti jejaring laba-laba

Capaian atas program layanan transportasi massal terhitung
1 Januari - 5 Oktober 2018



Bergabungnya
11 Operator Bus Kecil



Tergabungnya
484 Armada Bus Kecil



Terjualnya 96.622 Kartu Jak Lingko (dulu OK-OTrip) yang terintegrasi dengan Transjarta



Terlayannya Lebih dari 5 juta pelangg dengan capaian pelanggan tertinggi 68.404 per hari

Nantinya akan melibatkan moda transportasi berbasis rel, seperti MRT dan LRT.

#SetahunMajuBersama



Layanan Jakarta: Program Si Dukun 3 in 1

Merupakan layanan integrasi antara tiga instansi dalam rangka mempermudah administrasi kependudukan bagi ibu yang baru melahirkan anak di DKI Jakarta

→ [Icon] Tiga instansi yang bekerja sama yaitu Disdukcapil, Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan di 1 loket

Dokumen yang dilayani Si Dukun 3 in 1:

- ✓ Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit
- ✓ Nomor Induk Kependudukan
- ✓ Kartu Keluarga
- ✓ Akta kelahiran
- ✓ Kartu BPJS
- ✓ Kartu Identitas Anak

Layanan Si Dukun 3 in ditargetkan rampung selama tiga hari



Layanan ini sudah ada di
10 RSUD di Jakarta

RSUD Tarakan	RSUD Budi Asih
RSUD Koja	RSUD Pasar Rebo
RSUD Tanjung Priok	RSUD Pulau Seribu
RSUD Cengkareng	RSUP Fatmawati
RSUD Pasar Minggu	RSIA Budi Kemuliaan

Tahun 2019 ditargetkan seluruh rumah sakit akan terintegrasi layanan ini #SmartGovernment

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Jakarta Smart City
 @JSCLounge
 smartcity.jakarta.go.id



PTSP

#MelayaniJakarta

AJIB,

Antar Jemput Izin Bermotor



pelayanan.jakarta.go.id



LAYANAN JAKARTA: LAYANAN DARURAT 112

Layanan darurat 112 ialah sebuah layanan darurat melalui panggilan ke nomor tunggal 112 dari Pemrov DKI Jakarta untuk menerima dan merespons segala kondisi gawat darurat dari masyarakat untuk segera ditangani.

GRATIS Bagi warga DKI Jakarta

Masyarakat cukup menghubungi nomor **112** untuk melaporkan kondisi gawat darurat

Layanan ini dapat diakses telepon seluler maupun telepon rumah

Beberapa kondisi gawat darurat yang dapat ditangani:

- Darurat medis
- Kecelakaan
- Kebakaran
- Kekerasan dalam rumah tangga
- Gangguan keamanan
- Kecenderungan bunuh diri
- Bencana alam
- Segala kondisi gawat darurat lainnya

Layanan 112 dikoordinasi oleh **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta** dan terhubung dengan SKPD terkait, seperti:

- Dinas Kesehatan
- Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- Dinas Perhubungan
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Polda Metro Jaya

Layanan ini terhubung selama **24 jam sehari, 7 hari seminggu**

Panggilan ini bebas biaya dan dapat dilakukan bahkan dalam kondisi ponsel tanpa SIM card

@DKJjakarta Pemprov DKI Jakarta www.jakarta.go.id



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA
E-UJI EMISI

Selamat datang di Aplikasi Uji Emisi DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA

Aplikasi untuk memudahkan Anda dalam melakukan kegiatan uji emisi, terdapat beberapa fitur utama:

- Pencarian bengkel uji emisi
- Pantau Hasil Uji Emisi
- Sejarah Uji Emisi
- Pendaftaran Kendaraan Uji Emisi

GET IT ON Google Play

FITUR APLIKASI

PENCARIAN BENGKEL UJI EMISI
Anda dapat mencari lokasi bengkel terdekat untuk melakukan uji emisi kendaraan Anda

PANTAUAN HASIL UJI EMISI
Pantau hasil uji emisi kendaraan anda dengan cukup melakukan scan Barcode

TRACK SEJARAH UJI EMISI
Pantau secara cepat sejarah hasil uji emisi kendaraan Anda

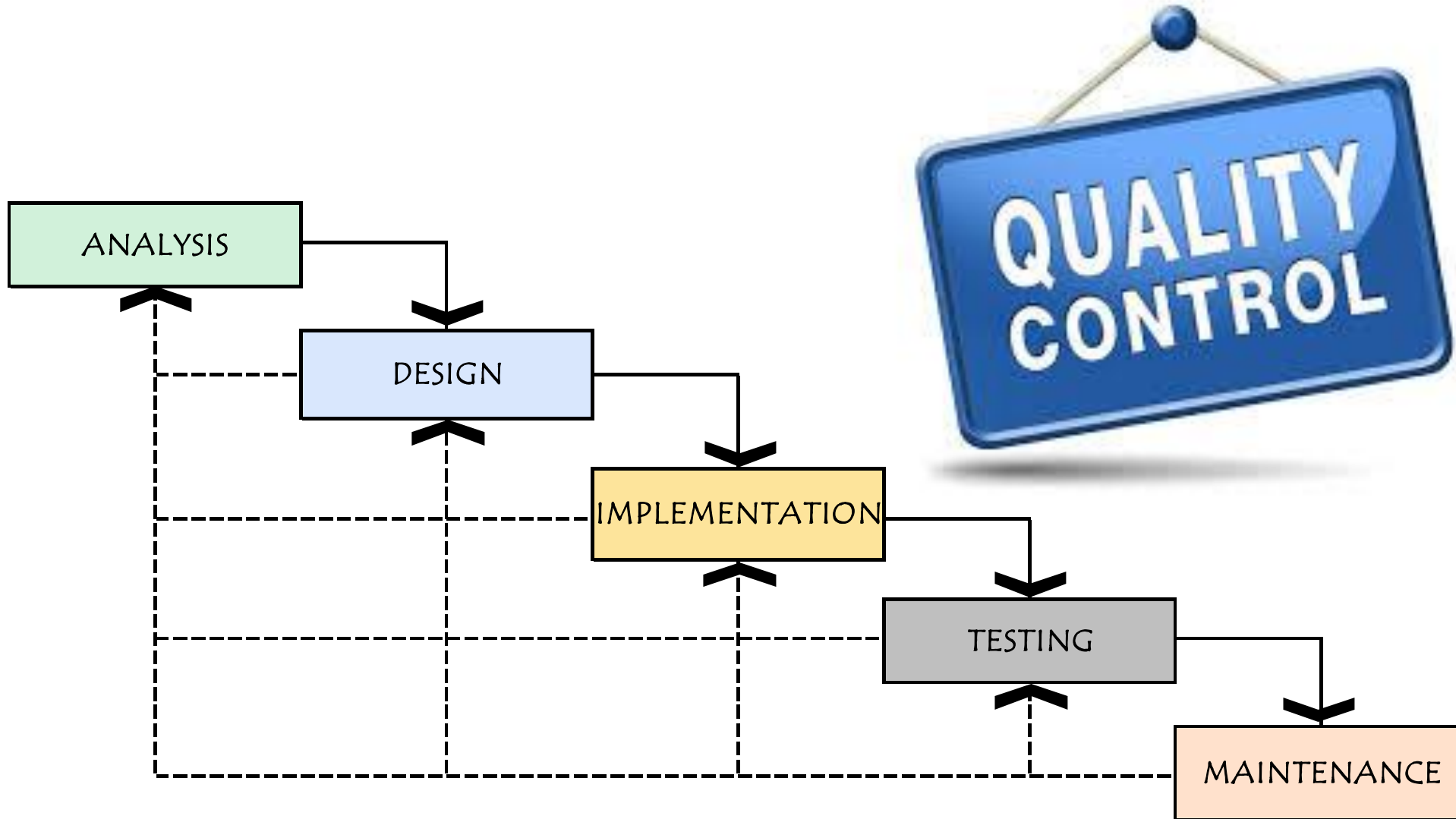
PENDAFTARAN KENDARAAN
Daftarkan kendaraan Anda sekarang juga untuk kenyamanan Uji Emisi

<http://ujiemisi.jakarta.go.id>

EVALUASI → SURVEI KEPUASAN PELANGGAN



PENGENDALIAN MUTU



ANALISIS PENYEBAB PERMASALAHAN

PELAYANAN PUBLIK

TATA KELOLA

- PERATURAN
- STANDAR PELAYANAN
- SOP
- MEKANISME

➤ Menyusun SOP Pelayanan Perizinan

KELEMBAGAAN

- REGULATOR
- OPERATOR

➤ Pembentukan BLUD

SUMBER DAYA MANUSIA

- KUALITAS
- KUANTITAS

➤ Penggunaan tenaga non PNS

ANGGARAN

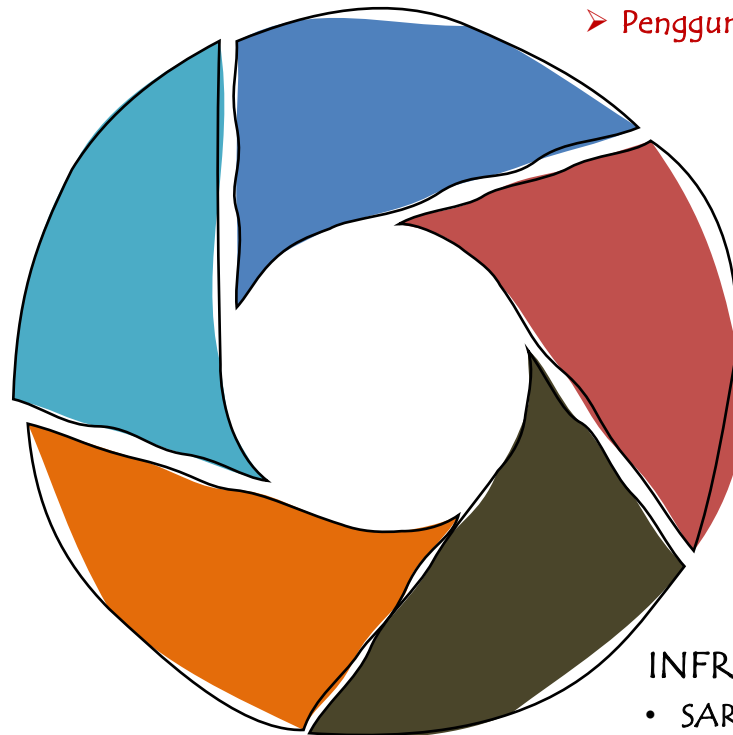
- OPERASIONAL
- PEMELIHARAAN

➤ Pemberian PSO Transjak, MRT dan LRT

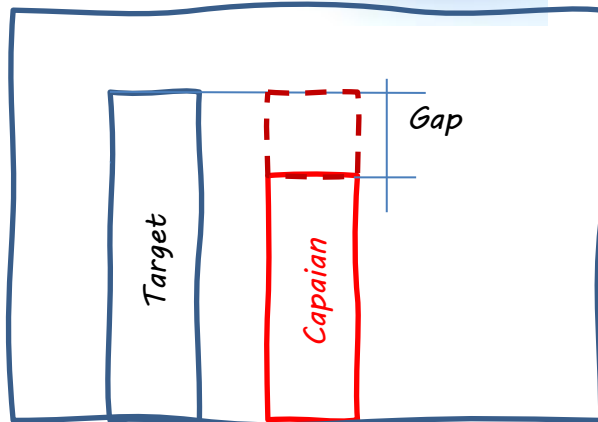
INFRASTRUKTUR

- SARANA
- PRASARANA

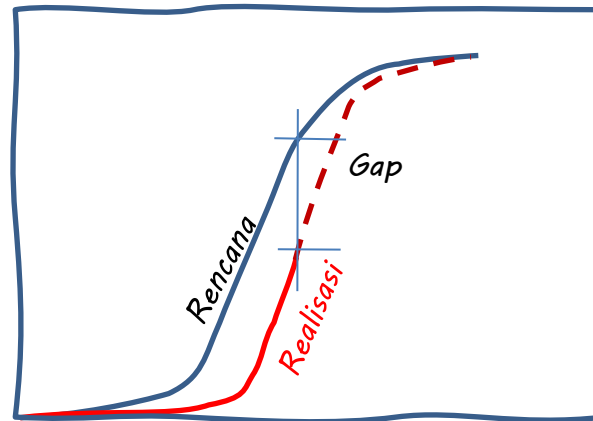
➤ Kerjasama pembangunan dengan badan usaha



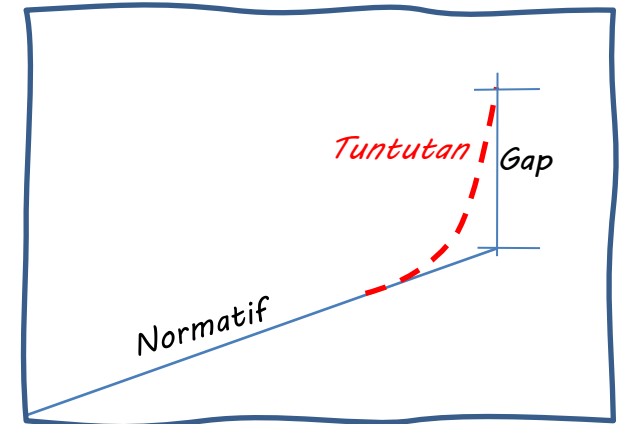
KESENJANGAN PELAYANAN



Tidak optimal
→ **Optimalisasi**



Lambat
→ **Akselerasi**



Business as usual
→ **Reformasi**

PELAYANAN PUSKESMAS

#bangga
melayani
bangsa



Sistem pendaftaran manual yang kurang efektif

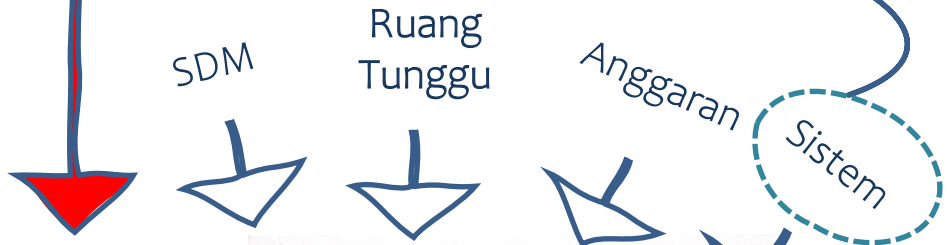
- 1.WA
- 2.Web
- 3.Android
- 4.Lainnya

SOLUSI

PENDAFTARAN ONLINE Berbasis Android



Pelayanan Prima Puskesmas



- 1.Pendaftaran
- 2.Jadwal dokter
- 3.Laboratorium
- 4.Apotek

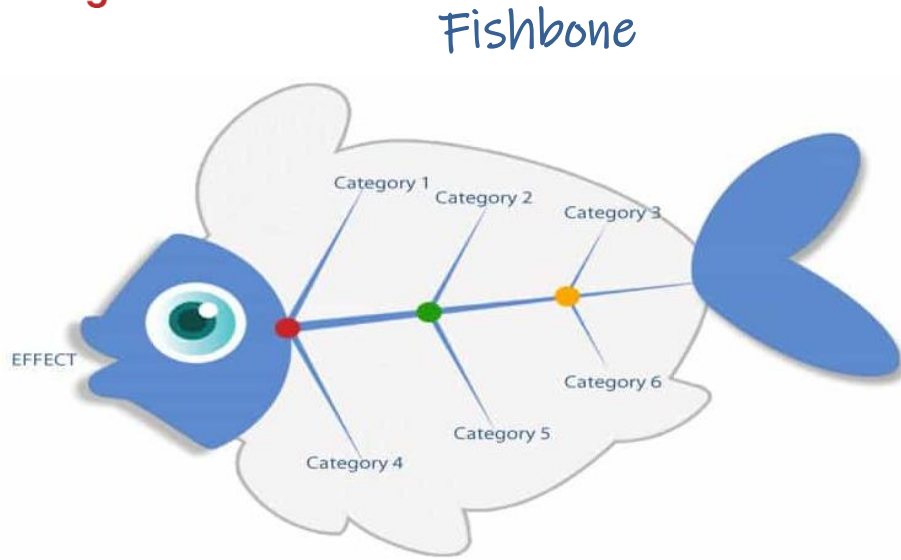


Mekanisme pendaftaran kurang optimal



Ketidakpercayaan masyarakat terhadap Puskesmas

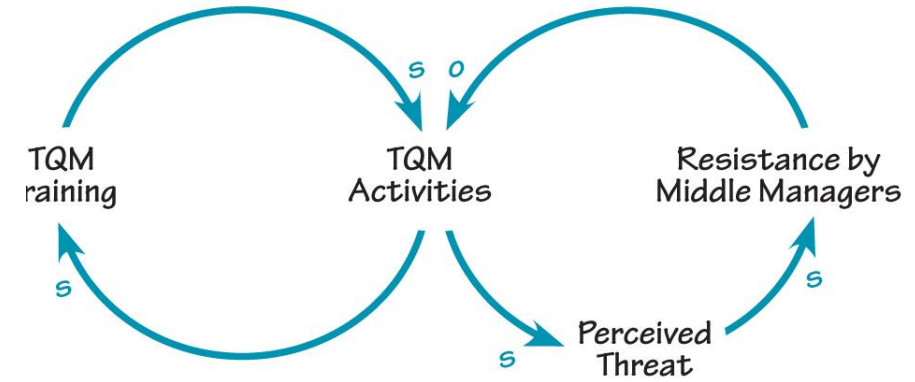
CONTOH → Instrumen Analisa



Tree Diagram



Causal Loop



Cost and Benefit Analisis



SWOT



Force Field Analisis



CONTOH → Instrumen Analisa

Likert APKL (Aktual, Problematik, Kehalayaan, Kelayakan)

ISU STRATEGIS	A	P	K	L	TOTAL
Isu Strategis 1	4	5	3	4	16
Isu Strategis 2	4	4	3	4	15
Isu Strategis 3	4	4	4	4	16
Isu Strategis 4	3	4	5	5	17

Analisa USG (Urgency, Seriousness, Growth)

MASALAH	U	S	G	TOTAL
Masalah A	3	4	5	12
Masalah B	3	5	5	13
Masalah C	4	4	5	13
Masalah D	5	5	5	15

Tapisan Mc. Namara (Efektifitas, Efisiensi, Kemudahan)

SOLUSI	Eft	Efs	M	TOTAL
Solusi 1	3	4	5	12
Solusi 2	3	5	5	13
Solusi 3	4	4	5	13
Solusi 4	5	5	5	15

Pemanfaatan Sumberdaya

Jejaring kerja antar
stakeholder

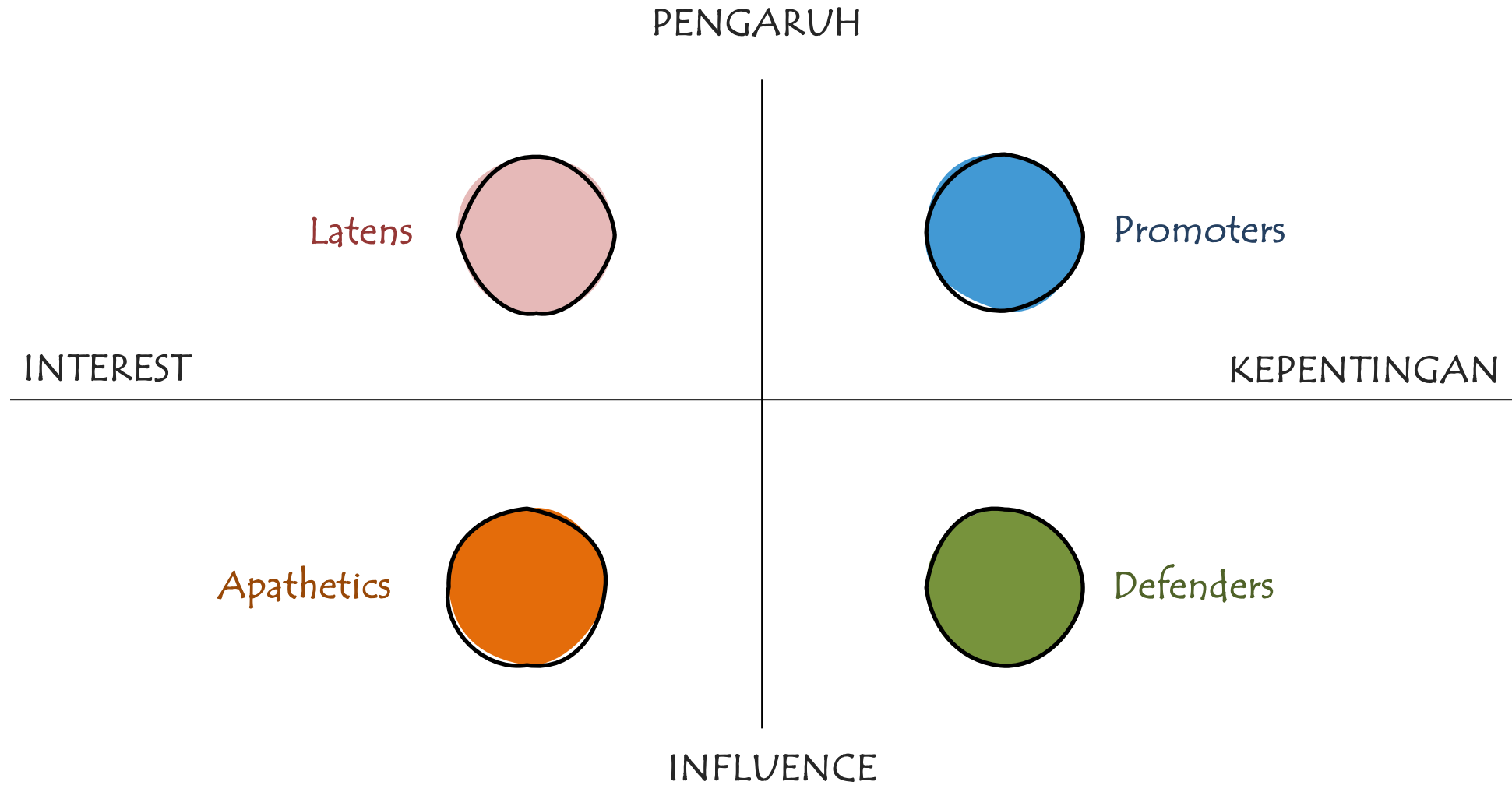


tim kerja

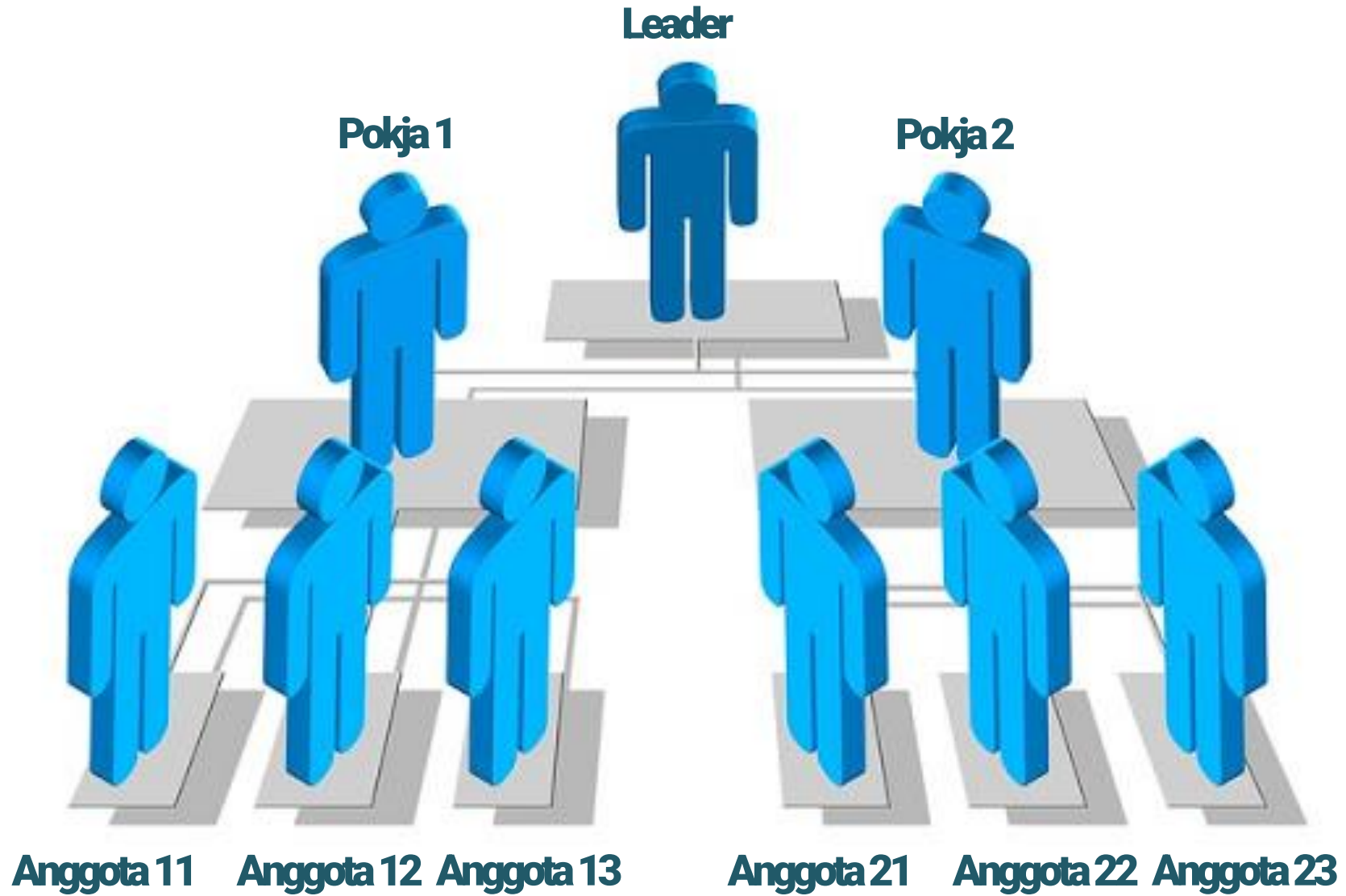


pemanfaatan teknologi digital

PETA STAKEHOLDERS



TIM KERJA



PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL

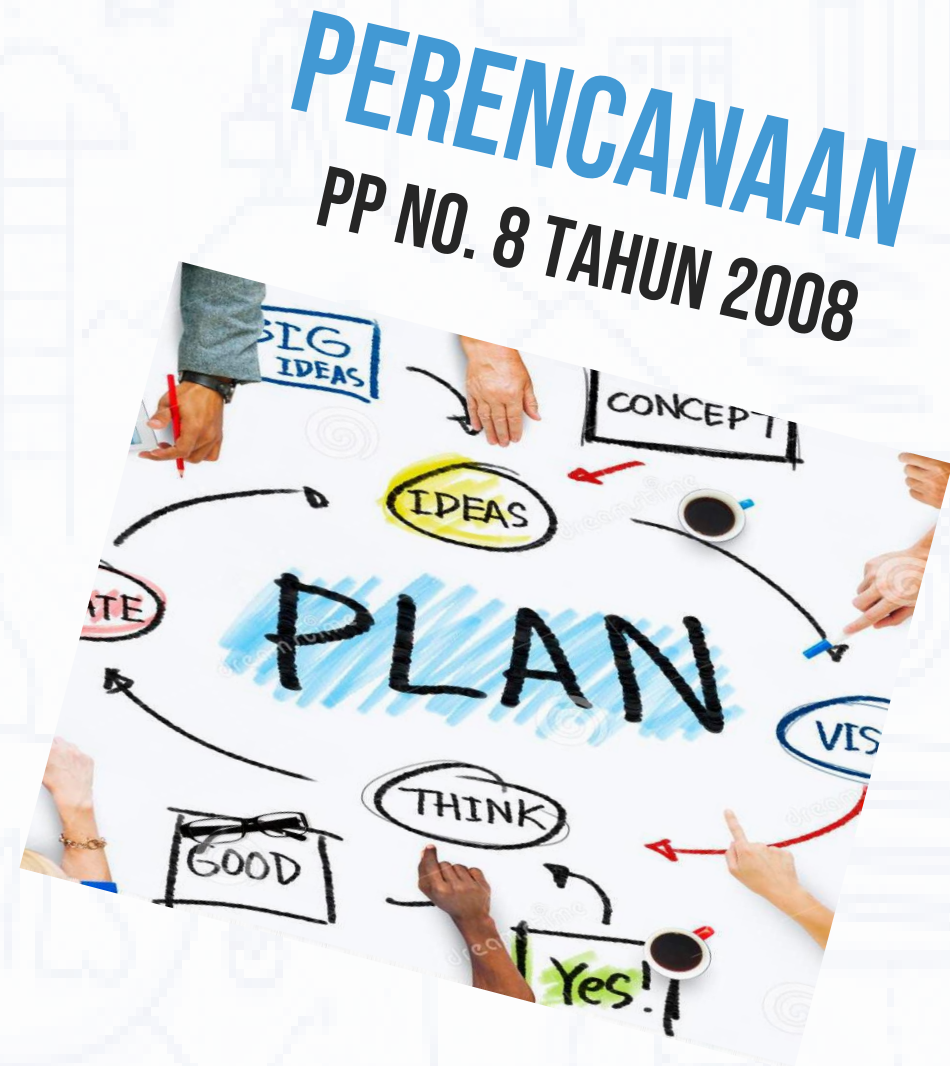




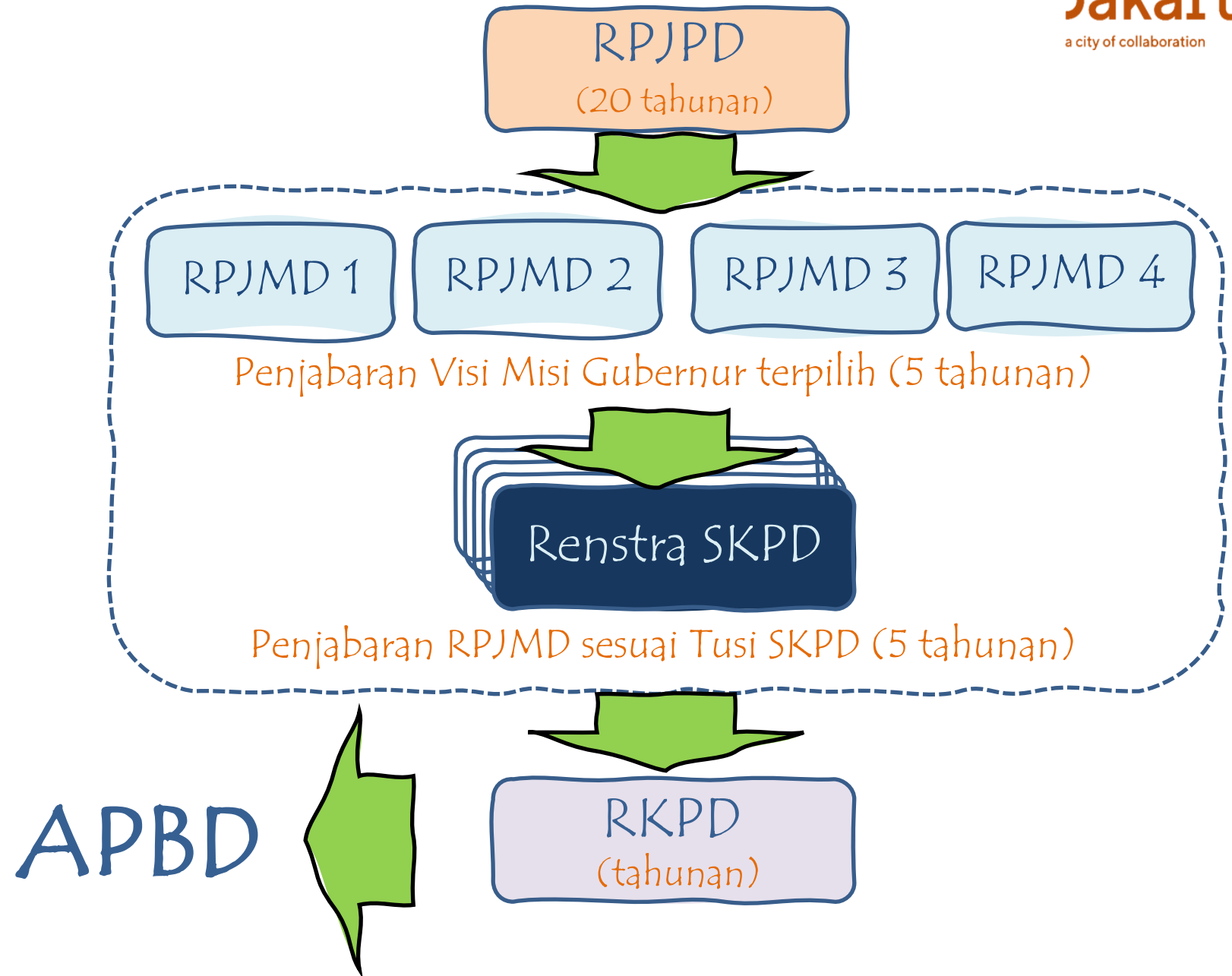
PEMAHAMAN PERENCANAAN

APA YANG DIMAKSUD DENGAN
PERENCANAAN.....?

Suatu **proses** untuk menentukan **tindakan masa depan** yang tepat, melalui **urutan pilihan**, dengan memperhitungkan **sumber daya** yang tersedia



Hirarki Dokumen Perencanaan



Siklus Perencanaan & Penganggaran



Banggar DPRD
 →



TAPD
 →



Gubernur
 →

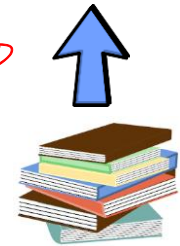
Kebijakan Umum APBD –
 Prioritas Plafon Anggaran Sementara
 (KUA PPAS)
 Paling lambat disampaikan ke DPRD
 Minggu 2 Juli

Kebijakan Umum APBD –
 Prioritas Plafon Anggaran
 (KUA PPA)
 Disepakati Gubernur dan DPRD
 Minggu 2 Agustus

Rencana Kerja dan Anggaran
 (RKA)
 Satuan Kerja Pemerintah
 Daerah (SKPD)

Rancangan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja
 (APBD)
 disampaikan ke DPRD
 paling lambat
 minggu 2 September

TAPD
 ↑



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 untuk pedoman penetapan
 Rencana Kerja (Renja) SKPD
 Ditetapkan paling lambat
 akhir Juni



DPRD
 ↓

Rancangan APBD dibahas
 DPRD dan ditetapkan
 paling lambat
 akhir November

BAPPEDA
 ↑



APBD
 Dilaksanakan



Raperda APBD
 Diperbaiki oleh Gubernur
 dan DPRD untuk ditetapkan
 menjadi Perda APBD paling
 lambat
 akhir Desember

Gubernur
 ↓



Raperda APBD
 Disampaikan ke Kemendagri
 untuk dievaluasi dan
 disampaikan kembali ke
 Gubernur selambatnya
 Pertengahan Desember

Referensi
 ←



Kelurahan → Januari
 Kecamatan → Februari
 Kota/Kabupaten → Minggu 4 Maret
 Provinsi → Minggu 2 April

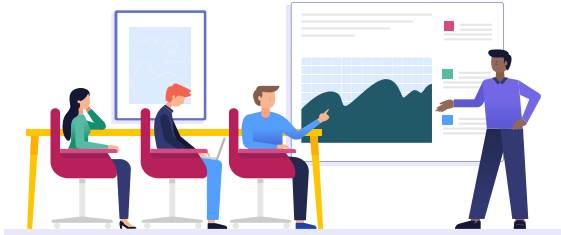
Dievaluasi
 ←



SKPD
 ←

Mendagri
 ←

TUGAS KELOMPOK



KELOMPOK A

Pengelolaan Air Limbah Domestik

KELOMPOK B

Pengelolaan Sampah

KELOMPOK C

Penyediaan Air Bersih

TUGAS :

1. Masing-masing anggota kelompok mengidentifikasi isu aktual sesuai tema (5 isu)
2. Tentukan isu actual utama yang perlu segera ditangani (1 isu prioritas) → **Analisa APKL**
3. Masing-masing anggota kelompok mengidentifikasi permasalahan terhadap isu prioritas yang terjadi saat ini (5 permasalahan) → **Fish Bone Diagram**
4. Tentukan permasalahan utama yang perlu segera ditangani (1 proritas permasalahan) → **Analisa USG**
5. Masing-masing anggota Identifikasi permasalahan yang lebih besar akan ditimbulkan jika tidak segera ditangani (5 permasalahan).
6. Masing-masing anggota kelompok mengidentifikasi alternatif solusi (5 alternatif).
7. Tentukan alternatif solusi yang paling tepat → **Analisa Mc Namara**
8. Buat srategi pelaksanaannya → **Analisa SWOT**
9. **Buat slide dan dipaparkan setelah coffee break.**

Ratusan Rumah di Jakarta Tak Punya Septic Tank, Tinja Langsung Dibuang ke Kali

Reporter: **Antara**

Editor: **Iqbal Muhtarom**

Rabu, 17 November 2021 23:18 WIB

0 KOMENTAR



Suasana pemukiman warga di bantaran kali di Kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 7 Juni 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendata fakir miskin dan orang tidak mampu secara daring. Melalui sistem yang dimiliki Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial (Pusdatin Jamsos)

Semakin Buruknya Pengelolaan Sampa di Jakarta dan Mimpi Jadi Kota Zero Waste...

Kompas.com - 22/02/2022, 08:34 WIB

BAGIKAN: [f](#) [t](#) [w](#) [a](#)

Komentar **5**



Tumpukkan sampah di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. (Dok. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.)

Miris! Pelayanan Air Pipa Jakarta Jauh dari Harapan

March 4, 2021



Facebook



Twitter



Pinterest



WhatsApp



Miris! Pelayanan Air Pipa Jakarta Jauh dari Harapan

Maju Kotanya Bahagia Warganya

TERIMA KASIH

AL PELAYANAN PUBLIK